

Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014

Muara Nangarumba
Staf Tenaga Ahli PPKE FEB Universitas Brawijaya
Email: muara07@gmail.com

Abstract

Income inequality is a problem that exists in every country and a problem that continually occurs. Government, particularly in Indonesia, faced with the problems to reduce income inequality, this is because the trend of income inequality has not decreased lately, so it is feared affect the welfare of the Indonesian people. This study aimed to assess the effect of the Agricultural Sector GDP, GDP Industrial Sector, Services Sector GDP, wages Minimum Province, Capital Expenditure and Investment Credits to Income Inequality in Indonesia in 2005 until 2014, using panel data regression. In this study the functional form of the regression model used is the model of a log-log or better known as double log, so that can know the elasticity of each independent variable on the dependent variable. The results achieved in this study, one of them is, it was found that the independent variables significantly affect income inequality with a negative effect, except variable Industrial Sector GDP. While elasticity, each independent variable inelastic to income inequality. Advanced Research also found that, according to some previous research, by improving the economic structure, raise funds for infrastructure investments multiply, increasing the minimum wage, or reduce migration can reduce the level of income inequality.

Keywords: *Income inequality, Regression Panel Data, Regional Economic Structures, Government Spending, Minimum Wage*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Semua negara menginginkan adanya peningkatan standar hidup bagi setiap rakyatnya dari segala lapisan, dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana-rencana pembangunan dan melaksanakannya melalui partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Sehingga, peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan target dari setiap negara, dimana peningkatan kesejahteraan ini adalah bagian dari fungsi pemerintah sebagai *agent of development* dalam hal stabilisasi ekonomi. Maka sebaiknya, segala kebijakan yang direncanakan maupun yang diimplementasikan perlu mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga untuk menciptakan dalam peningkatan kesejahteraan tersebut perlu diiringi pembangunan ekonomi yang baik.

Secara tradisional, pembangunan ekonomi memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004:62).

Namun pada akhir 1960 banyak negara berkembang yang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*) (Kuncoro, 2004:63). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya telah melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka. Hal ini memang dapat dicapai namun setelah diikuti dengan dengan masalah-masalah umum ketimpangan, seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural.

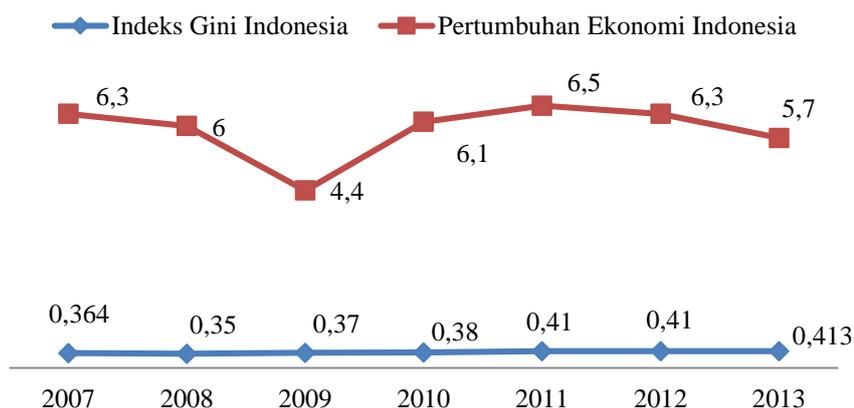
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mendeskripsikan perkembangan produksi barang dan jasa, sedangkan pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi..Sehingga, dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi hanya ‘memuja’ GNP, namun lebih pada kualitas proses pembangunan (Kuncoro, 2004:63).

Dalam memenuhi tantangan tersebut, negara memang perlu memiliki pendapatan yang cukup besar, namun jika kita telaah lebih dalam lagi, pembangunan ekonomi yang hanya bias terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan pembangunan ekonomi yang kurang berkualitas. Perubahan Pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan permasalahan salah satunya ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah yang biasa dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah masalah mengenai kesenjangan ekonomi/ ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, serta ketimpangan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

Dalam hal ini, peran pemerintah diperlukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi akan disertai pula oleh distribusi pendapatan yang semakin merata, dengan hal ini maka diharapkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dapat tercapai.

Permasalahan yang terkait ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap Negara dan menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi, sehingga menjadi isu yang *urgent*, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia.. Pemerintah dihadapkan pada permasalahan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, hal ini dikarenakan tren ketimpangan pendapatan tidak menurun akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2007-2013

Dari gambar 1, dapat kita ketahui bahwa kondisi ketimpangan pendapatan Indonesia dari tahun 2008 hingga 2013 semakin memburuk, hal ini ditandai dengan indeks yang semakin mendekati 1,00 setiap tahunnya, memang pada tahun 2008 trend tersebut menurun dari tahun 2007, dari 0,36 menjadi 0,35, namun selepas tahun 2008, angka tersebut naik drastis, berturut-turut menjadi 0,37 pada tahun 2009, 0,38 pada 2010, 0,41 pada 2011 dan 2012, dan 2013.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi utamanya jika kita melihat pada tahun 2009 hingga 2011, kita melihat fakta dari teori bahwa Negara-negara berkembang menghadapi sebuah *trade off* antara Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Setelah tahun 2011, kita melihat sebuah fenomena dimana pertumbuhan ekonomi yang memiliki tren menurun diiringi dengan ketimpangan pendapatan yang relatif stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami kondisi dimana kesejahteraan masyarakat menjadi stagnan dikala pertumbuhan ekonomi melemah.

Hal ini menjadi sesuatu yang kritis, dimana kebijakan-kebijakan yang ada dalam pembangunan ekonomi, malah menjadikan pemerintah dalam posisi serba salah. Padahal keinginan setiap negara tentu saja memberikan dan menjamin kesejahteraan pada masyarakatnya dengan menciptakan kondisi dimana suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga produktivitasnya terjaga dan tentu saja memiliki masyarakat yang sejahtera.

Dalam untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, pada penelitian ini berusaha mengkajinya menggunakan beberapa variabel seperti Struktur Ekonomi (Meliputi PDRB Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa), Upah Minimum Provinsi (UMP), Belanja Modal, dan Investasi.

Pengertian dari struktur perekonomian adalah besar *share* lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah.

Dari penelitian oleh Cohen dan Zysman, diketahui bahwa struktur ekonomi memiliki peran dalam Ketimpangan Pendapatan, utamanya pada negara berkembang, dengan struktur ekonomi yang belum dapat mengintegrasikan sector pertaniannya (*Core Activities*) dengan sector manufaktur dan jasa (*Supporting Activities*), umumnya memiliki distribusi pendapatan yang tidak merata.

Selanjutnya tingkat upah minimum merupakan salah satu faktor yang mampu melihat arus migrasi, dimana migrasi menurut Arthur Lewis merupakan

faktor yang dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan, Belanja Modal dalam hal ini mewakili biaya dalam pengadaan infrastruktur, dimana semakin banyak dan berkualitas nya infrastruktur diyakini dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Dan variabel terakhir yakni investasi, mampu mengurangi ketimpangan pendapatan apabila investasi pada suatu daerah bertambah, hal ini dikarenakan peningkatan investasi akan menciptakan lapangan kerja baru.

Dari uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh dari PDRB Sektor Pertanian, PDRB Sektor Industri, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal dan Kredit Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

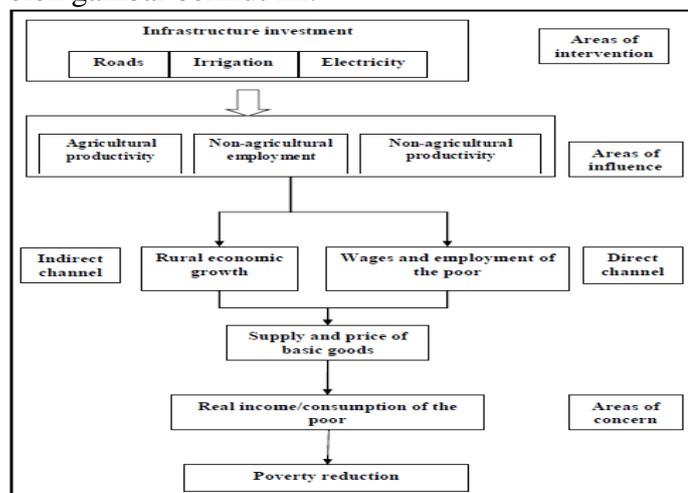
Definisi Ketimpangan Pendapatan

Definisi dari ketimpangan pendapatan sendiri seringkali dimaknai sebagai sebuah fenomena dimana terdapat selisih atau *gap* antara masyarakat ekonomi ke atas dan masyarakat ekonomi ke bawah yang berpihak sebelah. Pada Negara-negara berkembang kondisi yang berlangsung adalah jumlah masyarakat kaya yang lebih banyak dibandingkan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah.

Penyebab dari terjadinya ketimpangan pembangunan, menurut Kristiyanti (2007), adalah karena adanya tiga faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor alami, faktor kondisi sosial, dan keputusan-keputusan kebijakan. Faktor alami meliputi kondisi agroklimat, sumber daya alam, lokasi geografis, jarak pelabuhan dengan pusat aktivitas ekonomi, lokasi geografis, dan wilayah potensial untuk pembangunan ekonomi. Sementara faktor sosial budaya meliputi nilai tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi, dan wirausaha. Sedangkan faktor keputusan kebijakan adalah sejumlah kebijakan yang mendukung secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan terjadinya ketimpangan.

Teori Hubungan antara Infrastruktur, Investasi, Tenaga Kerja, Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

McCulloch dan McKay dalam Raychaudhuri (2010), menjelaskan bagaimana peran pembangunan infrastruktur dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh gambar berikut ini.



Gambar 2. Skema Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan. Sumber: Raychaudhuri (2010)

Jika kita melihat pada skema di atas, Hubungan Infrastruktur sendiri dalam mengurangi tingkat kemiskinan bersifat tidak langsung, dimana adanya investasi pada bidang infrastruktur, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, akan mampu mempengaruhi produktivitas dan jumlah angkatan kerja dalam berbagai sektor, maka dengan adanya infrastruktur yang memadai akan membuat produktifitas suatu sektor meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja, yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaji pada kaum miskin yang kemudian kedua hal tersebut mempengaruhi penawaran dan harga dari barang-barang kebutuhan pokok, selanjutnya dengan perkembangan dari kualitas hidup tersebut maka dapat terciptanya pengurangan angka kemiskinan. Semakin berkurangnya tingkat kemiskinan, maka akan memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, sehingga yang diharapkan, akan mendorong terjadinya pengurangan dari tingkat ketimpangan pendapatan. “ *Datt and Ravallion (1998) discussed the role of social infrastructure in enabling some States in India to reduce rural poverty faster than others. For example, Kerala State reduced rural poverty the fastest and had the highest literacy levels among men and women in the whole of India. This helped Kerala to export skilled workers—even from poorer rural households—it is out-migration mainly to the Gulf region. This generated a huge inflow of remittances from abroad, which is a key driver of raising income levels among the rural poor. Trade is therefore not confined to goods, but also encompasses international factor movements , which play a key role in the reduction of poverty as is clear from the case of Kerala.*”

Dari kutipan jurnal Raycahuduri di atas, membuktikan bahwa adanya pengembangan dan ataupun penambahan dari infrastruktur, dapat mengurangi tingkat kemiskinan lebih cepat. Dengan adanya infrastruktur yang lebih memadai maka suatu daerah akan dapat mengeksport tenaga kerjanya, termasuk tenaga kerja dari kaum miskin. Selain itu dengan infratraktur yang memadai maka akan memudahkan sekaligus mengundang investor masuk ke suatu daerah sehingga akan meningkatkan kondisi ekonomi pada daerah tersebut.

Kaitan Struktur Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Pada penelitian oleh Anandya Dastidar dalam penelitian yang berjudul *Income Distribution and Structural Transformation: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries*, didapatkan hasil bahwa penelitian ini membandingkan pengaruh struktur ekonomi pada ketimpangan pendapatan di Negara maju dan Negara berkembang.

Hasilnya adalah pada Negara berkembang terjadi kondisi dimana sektor jasa dan industri lebih dominan dari pertanian. Kondisi ini ternyata meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan umumnya pada negara berkembang lebih mengutamakan majunya sektor industri dan cenderung meninggalkan sektor pertanian. Padahal sektor pertanian memiliki banyak tenaga kerja, namun kurang terdidik. Angkatan kerja di sektor pertanian inilah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Sedangkan di negara maju berkembangnya sektor jasa dan berkurangnya pangsa sektor industri dan pertanian, akan mengurangi dalam ketimpangan pendapatan.

Hal ini dikarenakan pada negara maju sudah memiliki fase yang berbeda dengan negara maju, dengan adanya tingkat pendidikan di masyarakat yang tinggi dan tingkat penggunaan teknologi sudah cukup pesat, mendorong masyarakat untuk berkerja pada sektor jasa. Industri mereka lebih cenderung ke padat modal walau

memang beberapa perlu dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja, namun dengan lebih dominannya mesin dan teknologi, maka kualitas tenaga kerja yang dituntut pada sektor industri cenderung lebih tinggi, sektor pertanian sendiri menganut teori cohen dan zysman, yakni terintegrasi dengan baik dengan sektor industri dan jasa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengertian dari penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

Sedangkan, penelitian kuantitatif, menurut (Donmoyer, 2008), adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Penelitian kuantitatif sering dipandang sebagai antitesis atau lawan dari penelitian kualitatif, walau sebenarnya perbedaan kualitatif-kuantitatif tersebut agak menyesatkan. Donmoyer beralasan, banyak peneliti kuantitatif tertarik mempelajari aspek-aspek kualitatif dari fenomena. Mereka melakukan kuantifikasi gradasi kualitas menjadi skala-skala numerik yang memungkinkan analisis statistik.

Dari kedua pengertian tersebut, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data dan Variabel Penelitian

Lingkup dari penelitian adalah 33 Provinsi di Indonesia, dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dan studi pustaka, variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian. Tabel ini berisi data yang digunakan pada penelitian ini beserta sumbernya. Indeks Williamson merupakan variabel dependen sedangkan variabel lainnya merupakan independen.

Variables	Sumber
Indeks Williamson (Dependen)	www.bps.go.id
PDRB Sektor Pertanian	www.bps.go.id
PDRB Sektor Industri	www.bps.go.id
PDRB Sektor Jasa	www.bps.go.id
Upah Minimum Provinsi	Depnakertrans
Belanja Modal	www.djpk.go.id
Kredit Investasi	www.bi.go.id

Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bentuk fungsional model regresi berjenis model *log-lin* atau lebih dikenal dengan *semi log*. Penggunaan bentuk fungsional ini adalah dikarenakan data dependen yang digunakan berupa indeks, sehingga model *semi log* lebih tepat untuk digunakan.

Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel (-variabel) yang lain dan Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan *data time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dalam Uji Asumsi Klasik, *Non-autcorrelation* inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel. Sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model *time series* maka ada informasi keragaman dari unit *cross section* yang diabaikan dalam pemodelan, padahal Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit *cross section*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*. Dikarenakan dalam hasil uji chow guna menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*, dengan menggunakan aplikasi E-views 6, didapatkan hasil sebagai berikut.

Redundant Fixed Effects Tests		
Pool: POOL		
Test cross-section fixed effects		
Effects Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	184.737929	0.0000
Cross-section Chi-square	1009.602919	0.0000

Gambar 3. Hasil uji chow dengan aplikasi E-views 6. Uji ini didapat dengan membandingkan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

Dari gambar 3, dapat dilihat bahwa nilai Prob pada *Cross-Section F* menunjukkan angka dibawah α sebesar 0,05. Sehingga H_0 Ditolak dan Model yang dipilih adalah Metode *Fixed Effect Model*.

Setelah, diketahui bahwa *Fixed Effect Model*.lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*, maka selanjutnya membandingkan *Fixed Effect Model*.dengan *Random Effect Model* dengan menggunakan uji Hausman.

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Pool: POOL			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.971319	6	0.0000

Gambar 4. Hasil uji Hausman dengan aplikasi E-views 6. Uji ini didapat dengan membandingkan *Random Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

Pada hasil pada gambar 4 di atas menunjukkan bahwa nilai *chi-square* tidak signifikan pada model *random effect*. Nilai Prob sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan kondisi tolak H_0 . Dengan hipotesis statistik:

H_0 = Metode Random Effect

H_1 = Metode Fixed Effect

Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, *fixed effect model* merupakan model terbaik yang lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini. Setelah diketahui *fixed effect model* adalah model terbaik maka selanjutnya adalah mengintrepetasi hasil model *fixed effect model* tersebut. Dimana hasilnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.

Dari hasil estimasi pada *model fixed effect* diatas, maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$LNIW = \beta_0 + \beta_1 \text{ LN PDRB Sektor Pertanian} + \beta_2 \text{ LN PDRB Sektor Industri} + \beta_3 \text{ LN PDRB Jasa} + \beta_4 \text{ LN Belanja Modal} + \beta_5 \text{ LN Upah Minimum Provinsi} + \beta_6 \text{ LN Kredit Investasi} + e$$

Dimana :

$$LNIW = -0.611319 - 0,2234851it + 0,268360X2it - 0.095511X3it - 0.170150X4it - 0.054070X5it - 0.000551X6t$$

Dari model di atas dapat dilihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Indeks Williamson), Namun, dikarenakan data tersebut sebelumnya telah ditransformasi dalam bentuk Logaritma Natural (LN), maka dalam intrepetasinya, hasil di atas perlu di *inverse* atau dengan kata lain anti LN. hasil *inverse* tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh tabel 2.

Tabel 2. Hasil Transformasi Anti LN.

Variabel	Koefisien	Transformasi Anti LN
C	-0,61131	-0,126346
LNINV	-0,00055	-0,099944
LNJASA	-0,09551	-0,0908908
LNBELANJA	-0,17015	-0,0843538
LNAGRI	-0,22348	-0,0799726
LNUMP	-0,5407	-0,0582340
LNIND	0,26836	0,0730781

Sehingga, model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,126346786 - 0,079972689X_{1it} + 0,073078178X_{2it} - 0,090890836X_{3it} - 0,084353828X_{4it} - 0,058234047X_{5it} - 0,099944915X_{6t}$$

Dependent Variable: IW?					
Method: Pooled Least Squares					
Date: 06/26/15 Time: 14:55					
Sample: 2005 2014					
Included observations: 10					
Cross-sections included: 33					
Total pool (balanced) observations: 330					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	-0.611319	0.088935	-6.873732	0.0000	
LNAGRI?	-0.223485	0.041927	-5.330337	0.0000	
LNIND?	0.268360	0.021846	12.28425	0.0000	
LNJASA?	-0.095511	0.033479	-2.852868	0.0046	
LNBELANJA?	-0.170150	0.060083	-2.831899	0.0050	

LNUMP?	-0.054070	0.024158	-2.238140	0.0260
LNINV?	-0.000551	0.000128	-4.315720	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	0.207202			
_SUMUT--C	-0.302422			
_SUMBAR--C	-0.090486			
_RIAU--C	-0.085860			
_JAMBI--C	-0.101343			
_SUMSEL--C	-0.107992			
_BENGKU--C	0.262760			
_LAMPUNG--C	-0.438090			
_BABEL--C	-0.312741			
_KEPRIAU--C	-0.486607			
_DKI--C	0.584543			
_JABAR--C	-0.477603			
_JATENG--C	-0.222014			
_DIY--C	0.141828			
_JATIM--C	-0.037150			
_BANTEN--C	-0.086756			
_BALI--C	-0.065511			
_NTB--C	0.591503			
_NTT--C	0.415299			
_KALBAR--C	-0.217362			
_KALTENG--C	-0.292433			
_KALSEL--C	-0.082400			
_KALTIM--C	-0.389944			
_SULUT--C	0.208131			
_SULTENG--C	-0.168874			
_SULSEL--C	-0.096917			
_SULTRA--C	0.066833			
_GORO--C	0.097592			
_SULBAR--C	-0.129196			
_MALUKU--C	0.504882			
_MALKUT--C	-0.257416			
_PAPUA--C	1.072653			
_PABAR--C	0.295891			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.863834	Mean dependent var		-0.330933
Adjusted R-squared	0.859111	S.D. dependent var		0.251687
S.E. of regression	0.050893	Akaike info criterion		-3.007585
Sum squared resid	0.753721	Schwarz criterion		-2.558601
Log likelihood	535.2515	Hannan-Quinn criter.		-2.828492
F-statistic	204.0886	Durbin-Watson stat		0.704575
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*. Hasil ini didapatkan dengan menggunakan aplikasi E-Views 6. Penggunaan *Fixed Effect Model* dikarenakan model ini adalah model terbaik.

Dari tabel 5.1. diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan adalah Kredit Investasi, variabel upah minimum provinsi, Variabel PDRB Jasa, Variabel Belanja Modal, dan variabel PDRB Pertanian. Sedangkan Variabel PDRB Industri memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan dari persamaan diatas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari hasil konstanta didapatkan nilai Sebesar -0,126346786 menyatakan bahwa jika variabel bebas ($x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$) dianggap konstan, maka Y adalah sebesar -0,126346786. Sehingga, keenam variabel bebas tersebut bukan merupakan variabel yang lengkap atau pasti, masih ada variabel bebas yang tidak diperhitungkan atau tidak dimasukkan dalam model tersebut.
2. Koefisien PDRB Sektor Pertanian pada *fixed effect model* menunjukkan nilai -0,079972689. Dengan asumsi variabel lainnya, yakni (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) tidak berubah (konstan), maka perubahan pada Y ditentukan oleh variabel x_1 , yang mana pengaruhnya negatif. Hal ini terjadi pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti setiap peningkatan pada PDRB Sektor Pertanian sebesar 1 Triliun Rupiah maka akan menurunkan nilai dari Indeks Williamson sebesar 0,07.
3. Koefisien PDRB Sektor Industri pada hasil *fixed effect model* menunjukkan nilai 0,073078178. Dengan asumsi variabel lainnya, yakni (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) tidak berubah (konstan), maka perubahan pada Y ditentukan oleh variabel x_1 , yang mana pengaruhnya positif. Hal ini terjadi pada besaran tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti setiap peningkatan pada PDRB Sektor Industri sebesar 1 Triliun Rupiah maka akan meningkatkan Indeks Williamson sebesar 0,07.
4. Koefisien PDRB Sektor Jasa pada *fixed effect model* menunjukkan nilai sejumlah -0,090890836. Dengan asumsi variabel lainnya, yakni (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) tidak berubah (konstan), maka perubahan pada Y ditentukan oleh variabel x_1 , yang mana pengaruhnya negatif. Hal ini terjadi pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti setiap peningkatan pada PDRB Sektor Jasa sebesar 1 Triliun Rupiah maka akan menurunkan Indeks Williamson sebesar 0,09.
5. Koefisien Belanja Modal pada hasil dari *fixed effect model* menunjukkan nilai sejumlah -0,084353828. Dengan asumsi variabel lainnya, yakni (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) tidak berubah (konstan), maka perubahan pada Y ditentukan oleh variabel x_1 , yang mana pengaruhnya negatif. Hal ini terjadi pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti setiap peningkatan pada Belanja Modal sebesar 1 Triliun Rupiah maka akan menurunkan Indeks Williamson sebesar 0,08.
6. Koefisien Upah Minimum Provinsi pada *fixed effect model* menunjukkan nilai -0,058234047. Dengan asumsi variabel lainnya, yakni (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) tidak berubah (konstan), maka perubahan pada Y ditentukan oleh variabel x_1 , yang mana pengaruhnya negatif. Hal ini terjadi pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti setiap peningkatan pada Upah Minimum Provinsi sebesar 1 Triliun Rupiah maka akan menurunkan Indeks Williamson sebesar 0,05.
7. Koefisien Upah Minimum Provinsi pada *fixed effect model* menunjukkan nilai -0,099944915. Dengan asumsi variabel lainnya, yakni (x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) tidak berubah (konstan), maka perubahan pada Y ditentukan oleh variabel x_1 , yang mana pengaruhnya negatif. Hal ini terjadi pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti setiap peningkatan pada Upah Minimum Provinsi sebesar 1 Triliun Rupiah maka akan menurunkan Indeks Williamson sebesar 0,09.

Dari hasil tersebut jika dirangkumkan dan ditelaah lebih dalam memiliki arti sebagai berikut:

1. Dari segi struktur ekonomi, ditemukan hasil bahwa produktivitas sektor jasa merupakan sektor yang memiliki pengaruh terbesar dari sektor pertanian dan industri dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memiliki banyak penyerapan tenaga kerja namun kualitasnya masih rendah, sedangkan sektor jasa memiliki kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi

namun masih menyerap sedikit tenaga kerja jika dibandingkan sektor pertanian namun lebih besar dari sektor industri. Sehingga jika produktivitas kedua sektor tersebut ditingkatkan akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga diduga akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

2. Pada belanja modal, variabel ini akan mewakili pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk infrastruktur. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran belanja modal lebih banyak digunakan dalam kaitannya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur. Sedangkan investasi adalah lebih berasal dari swasta. Peningkatan dari belanja modal dan investasi pada bidang infrastruktur akan meningkatkan kualitas dan jumlah infrastruktur, yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan produktivitas sektor yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
3. Pada upah minimum provinsi (UMP), peningkatan pada variabel ini akan mengurangi ketimpangan pendapatan dikarenakan. diduga bahwa peningkatan dari Upah Minimum Provinsi akan mengurangi arus migrasi khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Berkurangnya arus migrasi didorong oleh teori bahwasanya migrasi terjadi dikarenakan faktor ekonomi, dalam artian peningkatan penghasilan, dimana salah satunya diukur dari upah. Jika upah meningkat maka sebagian tenaga kerja yang berpenghasilan rendah dan menengah diduga akan mengurangi tingkat migrasi dikarenakan daya beli mereka telah bertambah.

Selanjutnya, kelebihan dari regresi data panel adalah dapat melihat perilaku yang berbeda pada tiap daerah/ *cross section*. Sehingga hasilnya adalah sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Tabel *Individual Effect*. Tabel ini menjelaskan keragaman dari tiap daerah/ *cross section* yang dikaji pada penelitian ini.

Rank	Wilayah	Individual effect	Rank	Wilayah	Individual effect
1	NTB	-0,09804	18	Sulawesi Selatan	-0,04925
2	DKI Jakarta	-0,09736	19	Jambi	-0,04903
3	Maluku	-0,0899	20	Sumatera Selatan	-0,04871
4	NTT	-0,0822	21	Sulawesi Barat	-0,04769
5	Papua Barat	-0,07295	22	Sulawesi Tengah	-0,04583
6	Bengkulu	-0,07057	23	Kalimantan Barat	-0,04366
7	Sulawesi Utara	-0,06682	24	Jawa Tengah	-0,04346
8	NAD	-0,06676	25	Maluku Utara	-0,04195
9	DIY Yogyakarta	-0,06253	26	Kalimantan Tengah	-0,0405
10	Gorontalo	-0,05983	27	Sumatera Utara	-0,0401
11	Sulawesi Tenggara	-0,05801	28	Bangka Belitung	-0,03969
12	Jawa Timur	-0,05228	29	Kalimantan Timur	-0,03674
13	Bali	-0,05082	30	Lampung	-0,03501
14	Kalimantan Selatan	-0,04997	31	Jawa Barat	-0,03366
15	Riau	-0,0498	32	Kepulauan Riau	-0,03336
16	Banten	-0,04975	33	Papua	0,09373
17	Sumatera Barat	-0,04957			

Berdasarkan tabel Hasil *individual effect* dapat memperlihatkan *individual effect* pada tiap-tiap provinsi, dimana keseluruhan provinsi memiliki nilai negatif, yang dapat diartikan bila model ini diaplikasikan diduga dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Indonesia. Tiga provinsi yang memiliki nilai *individual* terbesar dalam menurunkan Indeks Williamson, yakni Provinsi NTB, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Maluku. Selanjutnya, penjelasan terkait 3 daerah dengan pengaruh terbesar adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi ini merupakan wilayah yang mendapat pengaruh paling tinggi dari model penelitian ini, diduga hal ini dikarenakan provinsi ini memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, namun memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan jasa, bahkan sektor industri merupakan sektor yang kurang berkembang dibandingkan kedua sektor lainnya, sehingga jika investasi didorong kepada sektor pertanian dan jasa kemungkinan akan dapat berpengaruh dalam kaitannya menurunkan besaran tingkat ketimpangan pendapatan. Namun sektor industri tentu tidak boleh dilupakan, saran kedua untuk wilayah ini adalah mensinergikan ketiga sektor tersebut dengan basis sektor pertanian. Selanjutnya belanja modal pada wilayah ini cukup rendah, namun jika ditambah maka akan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapat, sehingga saran ketiga pada wilayah ini adalah menambah porsi belanja modal yang lebih diperuntukan pada infrastruktur jalan.

2. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan *individual effect* terbesar kedua, artinya wilayah ini peringkat kedua terbesar dalam menerima efek dari model penelitian ini. Penyebab dari hal ini salah satunya adalah bahwa dari indeks Williamson, daerah ini merupakan peringkat ke 27 dari indeks terendah atau peringkat 7 dengan nilai indeks tertinggi. Sehingga jika model ini diterapkan, maka diduga akan memberikan efek yang cukup untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan Indeks Williamson. Sedangkan yang kedua, dilihat dari struktur ekonominya, wilayah ini mengandalkan sektor industri yang mana memiliki pengaruh positif dengan ketimpangan pendapatan, bilamana terjadi peningkatan dari PDRB sektor industri maka akan menaikkan ketimpangan, namun tingginya pengaruh dari produktivitas sektor jasa diyakini masih mampu sedikitnya mengurangi efek dari produktivitas sektor industri tersebut, dikarenakan sektor jasa ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang lebih baik dari sektor industri. sehingga jika ingin menurunkan besaran tingkat ketimpangan pada wilayah ini, maka sektor tersebut perlu didorong untuk bersinergi dengan sektor jasa dan pertanian. Sehingga diharapkan produktivitas dari sektor tersebut dapat “menular” pada dua sektor lainnya. Selanjutnya untuk penyebab ketiga, wilayah ini memiliki investasi yang sangat dominan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, baik dari segi swasta, yang diwakili kredit investasi, maupun pemerintah, yang diwakili, belanja modal.

3. Provinsi Maluku.

Provinsi Maluku memiliki pengaruh ketiga terbesar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Dimana hal ini, pertama jika dilihat dari syruktur wilayahnya didominasi oleh produktivitas sektor pertanian dan jasa, dimana keduanya adalah variabel yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan sektor industri merupakan sektor yang produktivitasnya paling

rendah diseluruh provinsi di Indonesia. Akan tetapi, jika produktivitas sektor industri dibiarkan terbelakang maka akan mengganggu dalam sinergi atau bauran antar sektor pada Provinsi Maluku, sehingga yang dapat disarankan adalah meningkatkan sinergitas antar sektor dengan basis pertanian. Dimana produk-produk pertanian akan ditunjuang oleh sektor industri sebagai pengolah barang mentah dari sektor pertanian menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, yang kemudian akan ditunjang oleh sektor jasa.

Sedangkan tiga provinsi yang memiliki pengaruh paling sedikit, yang pertama adalah Provinsi Papua, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa Barat. Dimana penjelasan masing-masing wilayah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Provinsi Papua

Penyebab Provinsi ini menjadi daerah yang mendapatkan pengaruh paling sedikit dikarenakan bahwa provinsi ini memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi kedua setelah provinsi papua barat, kendati bila variabel-variabel pada model ini di terapkan ternyata belum cukup untuk menciptakan pemerataan pendapatan, dalam artian perlu ada variabel-variabel lain untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua. Faktor kedua, disebabkan oleh ketimpangan pendapatan tersebut tidak didukung oleh kondisi investasi yang cukup, investasi di provinsi ini merupakan peringkat ke 30 atau 3 terendah dari seluruh provinsi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini, investasi merupakan variabel yang diyakini merupakan variabel yang paling berpengaruh. Yang ketiga, Provinsi Papua memiliki PDRB sektor pertanian, industri, dan jasa yang kurang kuat, walaupun yang ditunjang pula oleh belanja modal dan UMP yang tinggi guna menarik tenaga kerja dan investor, kebijakan tersebut belum mampu mendongkrak produktivitas sektor-sektor di papua, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur disana.

2. Provinsi Kepulauan Riau

Penyebab wilayah ini memiliki pengaruh terendah kedua setelah Provinsi Papua, dilator belakangi tingkat ketimpangan pendapatan yang dalam kategori rendah namun struktur ekonominya didominasi oleh produktivitas sektor industri yang teramat dominan. Penyebab keduanya adalah indeks willamson yang memang sudah rendah akan sulit untuk turun kembali secara drastis, dikarenakan sesuai dengan hukum *Law of diminishing return* perubahan sesuatu yang telah berada di puncak, nilai perubahannya akan semakin menurun.

3. Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki pengaruh terendah ketiga, penyebabnya diantaranya adalah kendati memiliki struktur ekonomi yang cukup bagus, faktor bahwa produktivitas sektor industri pada wilayah ini merupakan tertinggi di provinsi-provinsi di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama yang menghambat penurunan ketimpangan pendapatan pada wilayah ini. Produktivitas sektor industri berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, memang pada jumlah tertentu produktivitas sektor industri justru baik dalam memacu sinergitas antar sektor, namun meski sektor pertanian Provinsi Jawa Barat tertinggi kedua diseluruh Provinsi, jumlah ini terpaut jauh dengan produktivitas sektor industri. Sehingga diduga provinsi ini mengalami kelebihan produktivitas pada sektor industri dan kurang berimbang dengan sektor lainnya. Kedua, dilihat dari nilai UMP pada provinsi ini yang

memiliki peringkat ke 29 padahal memiliki produktivitas sektor yang aktif, dapat diduga bahwa upah pada wilayah ini terlalu rendah dibandingkan dengan aktifnya sektor-sektor yang dimiliki.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menggunakan dari bentuk fungsional model *semi log* pada regresi data panel, dimana ditemukan bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan Pendapatan. PDRB sektor industri merupakan satu-satunya variabel yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Sehingga, jika yang ingin diwujudkan adalah pemerataan pendapatan maka diperlukan peningkatan kinerja sektor pertanian dan jasa, peningkatan upah minimum provinsi, peningkatan anggaran belanja modal, dan peningkatan kredit investasi.
2. Dari sektor pertanian, industri, dan jasa sektor yang paling relevan dalam kaitannya mengurangi besaran tingkat ketimpangan pendapatan, sektor jasa merupakan sektor yang memiliki pengaruh terbesar dan yang kedua adalah sektor pertanian. Sektor industri satu-satunya yang memiliki pengaruh positif, artinya jika terjadi peningkatan produktivitas sektor industri akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan.
3. Berdasarkan nilai *individual effect*, Secara berturut-turut, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Maluku menjadi 3 daerah yang menerima pengaruh tertinggi, Dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku lebih berbasis pada sektor pertanian dan jasa yang memiliki kontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Sedangkan, untuk Provinsi DKI Jakarta memang memiliki PDRB Sektor Jasa yang lebih rendah dibandingkan sektor, namun Belanja Modal, Upah Minimum Provinsi, dan Kredit Investasinya merupakan yang tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia . Sedangkan untuk 3 wilayah dengan pengaruh yang terendah, dimiliki oleh Provinsi Papua, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa Barat. Pada Provinsi Papua dari segi struktur ekonominya dikarenakan Provinsi tersebut memiliki sektor pertanian, industri, dan jasa yang lemah, selain itu kredit investasinya pun rendah, walaupun dengan tingkat upah dan belanja modal yang tinggi ternyata belum cukup untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut. Sedangkan pada Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat terkendala pada sektor industrinya terlalu dominan dibandingkan sektor pertanian dan jasa.
4. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa anggaran pada bidang infrastruktur dapat berkontribusi mengurangi besaran tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori McCulloch dan McKay yang menjelaskan bahwa capaian pembangunan infrastruktur dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.
5. Pada penelitian ini didapatkan bahwa peningkatan upah minimum provinsi diduga akan mengurangi arus migrasi, dikarenakan dengan naiknya daya beli dan peningkatan konsumsi masyarakat miskin setidaknya akan menahan masyarakat tersebut untuk mencari penghasilan di daerah lain.

Sedangkan dari hasil penelitian ini, didapatkan beberapa saran dan rekomendasi guna mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, dimana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan sektor-sektor pada suatu daerah dengan cara menetapkan *core activities sector* dan *supporting activities sector*. Dimana hal ini dilandasi oleh teori Cohen dan Zysman. Sektor Pertanian dan Jasa ditemukan memiliki pengaruh negatif dengan ketimpangan pendapatan, maka sebaiknya diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendorong produktifitas kedua sektor tersebut seperti menaikkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur, mendorong tenaga kerja melalui kenaikan upah minimum provinsi pada daerah-daerah yang berbasis pertanian atau jasa sebagai sektor intinya, dan menaikkan investasi pada sektor-sektor berbasis pertanian atau jasa sebagai sektor intinya.
2. Dalam penerapannya di Indonesia, integrasi antar sektor perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang mendorong pada pengurangan impor dan menaikkan penggunaan produk dalam negeri, selain itu terjadi fenomena dimana pedagang memaksa petani membayar selisih penjualan untuk menanggulangi dari adanya Pajak Pertambahan Nilai sehingga hal ini mengganggu integritas antar sektor. Sehingga pemecahan masalah pada permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara (1) Mengatur besaran dan aturan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (2) Memberikan *Tax Allowance* kepada perusahaan yang banyak melakukan ekspor dan (3) Menciptakan industri yang berbasis pertanian.
3. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan cara menaikkan anggaran belanja modal atau anggaran lainnya yang diperuntukkan untuk infrastruktur. Dalam menghimpun dana tersebut tidak hanya diperlukan dana dari pemerintah saja, namun dapat menggunakan investasi dari swasta dengan cara mempermudah dan mempromosikan investor untuk berinvestasi pada bidang infrastruktur.
4. Dalam mengurangi arus migrasi dan juga mengurangi ketimpangan dari pendapatan, disarankan pemerintah dapat mem-pertimbangkan untuk menaikkan tingkat upah minimum, namun harus diiringi dengan menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang baik, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap mampu mempertahankan ataupun serta meningkatkan produktifitasnya.
5. Dalam penerapannya di Indonesia peningkatan upah minimum memiliki kendala bila upah pada sektor industri juga ikut meningkat, dikhawatirkan migrasi antar wilayah tetap tinggi dengan tujuan mencari pekerjaan pada sektor industri. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah (1) Menaikan tingkat upah minimum pada sektor pertanian dan jasa pada batas yang mampu menarik tenaga kerja pada sektor pertanian dan jasa, (2) Menaikan tingkat upah minimum pada daerah-daerah yang berbasis pada sektor pertanian.

Daftar Rujukan

- Baltagi, B.H. (2001). *Econometric analysis of panel data*. (2nd Edition). West Sussex: John Wiley & Sons, LTD.
- Badan Pusat Statistik (BPS).2014. *Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sektor Pertanian)*. Web: BPS.go.id, Diakses 12 Februari 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS).2014. *Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sektor Industri)*. Web: BPS.go.id, Diakses 12 Februari 2015.

- Badan Pusat Statistik (BPS).2014. *Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sektor Jasa)*. Web: BPS.go.id, Diakses 12 Februari 2015.
- Bank Indonesia (BI).2014. *Kajian Ekonomi Regional*. Web: bi.go.id, Diakses 28 Desember 2014.
- Black, Richard, Claudia Natali, and Jessica Skinner. 2006. *Migration and Inequality*. World Development Report 2006 Background Papers.
- Cevik, Serhan and Correa-Caro, Carolina. 2015. *Growing (Un)equal: Fiscal Policy and Income Inequality in China and BRIC+*.IMF Working Paper WP/15/68.
- Cristescu, Amalia. 2014. *The analysis of regional earnings inequalities in Romania*. Theoretical and Applied Economics Volume XXI (2014), No. 8(597), pp. 7-18.
- Dastidar, Ananya .2012. *Income Distribution and Structural Transformation: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries*. Seoul, Journal of Economics 2012, Vol. 25, No. 1.
- Davtyan, Karen. 2014.*Interrelation among Economic Growth, Income Inequality, and Fiscal Performance: Evidence from Anglo-Saxon Countries*. Universitat de Barcelona, Working Paper 2014/05, pàg. 2.
- Emrizal. 2008. *Industrialisasi Berbasis UMKM-Inovatif Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis April 2008 Volume 3 Nomor 1.
- Given, Lisa. (editor). 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar – Dasar Ekonometrika (Basic Econometrics), Edisi Kelima* . Penerbit : Jakarta, Salemba Empat.
- Hapsari, Tunjung. 2011. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayat, Muhammad Harris. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurita, Kyosuke and Kurosaki, Takashi. 2010. *The Dynamics of Growth, Poverty, and Inequality: A Panel Analysis of Regional Data from Thailand and the Philippines*. JEL classification codes: I32, O15.
- Kuncoro, Mudrajad 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kristiyanti, Linda. 2007. *Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Perannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lin, Carl and Su Yun, Myeong. 2014. *Minimum Wages and Income Inequality in Urban China*. JEL Classifications: J31, J38, O15, R23.

- Litchfield, Julie. 1999. *Updated Income Distribution And Poverty Measures For Chile: 1987-1998*. World Bank Journal of Poverty and Income Distribution in a High Growth Economy Background Paper No.1/99.
- Lyncolyn, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mckenzie, David. 2007. *Network effects and the dynamics of migration and inequality: Theory and evidence from Mexico*. Journal of Development Economics 84 (2007) 1–24.
- Nachhrowi Djalal Nacrowi. MSc., MPhil., AppSc., PhD. 2006. Pendekatan populer dan Praktis Ekonometrika untuk analisis Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, Indonesia Jakarta, 2006.
- Nachrowi, Djalal dan Usman, Hardius. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nangarumba. Muara. 2011. *Analisis Deskriptif Ketimpangan Pendapatan dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2005-2009*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Perez-Moreno, Salvador and Maria J. Angulo-Guerrero. 2010. *Income Inequality and Economic Freedom in the EU countries*. University of Malaga, Department of Applied Economics (Economic Policy)
- Park, Hun Myoung. 2011. *Practical Guides to Panel Data Modeling: A Step by Step Analyzing Using Stata*. Tersedia di: http://www.iuj.ac.jp/faculty/kucc625/method/panel/panel_iuj.pdf. Diakses pada 28 Februari 2015.
- Pawanto, Dadang Tulus. 2006. *Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Permatasari, Deviana. 2009. *Analisis Tingkat Spesialisasi Regional Dalam Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur (Studi Kasus Tahun 2005-2008)*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Rahmawati, Nurul. 2013. *Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2011*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Rayhchaudhuri, Ajitava. 2010. *Trade, Infrastructure and Income Inequality in Selected Asian Countries: An Empirical Analysis*. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No.82.
- Retnosari. 2006. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian.
- Rustiono, Deddy, 2008, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)*. Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ryder, Guy. 2014 *Wages and Incomes Inequality*. International Labour Organization (ILO) Global Wages Report 2014/15.
- Sadono, Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI Dengan Bima Grafika Jakarta.
- Samuelson, Paul. 1995. *Makro Ekonomi : Edisi Kesebelas*. Penerbit: Jakarta, Erlangga.

- Sapkota, Jeet Bahadur. 2015. *Infrastructure Access and Human Development: Cross-Country Evidence and Post-2015 Development Strategies*. Japan: Faculty of Humanities and Social Sciences, University Tsukuba.
- Seiferling, Mike. 2014. *Income Inequality, Fiscal Decentralization and Transfer Dependency*. IMF Working Papper WP/14/64.
- Senis, Yotam. 2009. *Teori-teori Utama Pembangunan*. Jurnal Sosiologi. Yogyakarta: Universitas Gadjahmada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharso. 2006. *Elastisitas Produksi Perikanan Tangkap Kota Tegal*.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sukmadinata.2006. *Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung. Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Terjemahan, Edisi Keenam, Jilid 1 dan 2*. Penerbit : Jakarta, Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi. Terjemahan, Edisi Sebelas, Jilid 1 dan 2*. Penerbit : Jakarta, Erlangga.
- Tsounata, Evridiki and Osueke, Anayochukwu. 2014. *What is Behind Latin America's Declining Income Inequality?*.IMF Working Papper WP/14/124.